

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
(LKPP)**

Nota Dinas

Nomor : 10214/Ses.1/04/2023

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Maret 2023
Tanggal : 13 April 2023

Sehubungan dengan masa penyampaian laporan bulanan untuk periode bulan Maret 2023 oleh setiap Unit Organisasi Eselon II yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pagu anggaran LKPP tahun 2023 sebesar Rp200.222.132.000 dan sampai dengan 31 Maret 2023 realisasi penyerapan anggaran LKPP berdasarkan aplikasi Monsakti (kumulatif) adalah sebesar Rp27.603.109.569 (13,79%).
2. Realisasi anggaran LKPP pada bulan Maret 2023 (parsial) adalah sebesar Rp13.833.048.884, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Maret 2023 sebesar Rp13.852.932.793 sehingga memiliki deviasi sebesar minus (-)Rp19.883.909 atau -0,14%.
3. Pada bulan Maret 2023, LKPP telah membuat kontrak/komitmen sebanyak 31 paket dengan total nilai kontrak yaitu sebesar Rp35.813.173.126 dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp8.876.262.075.
4. Pada tahun 2023, pagu pengadaan LKPP sebesar Rp144.812.970.000 (72,33%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 03 April 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp111.124.906.200 atau sebesar 76,74%. Masih terdapat Rp33.688.063.800 (23,26%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
5. Pada bulan Maret 2023 Nilai IKPA LKPP berdasarkan Aplikasi OM-SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 96,06 dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan adalah sebesar 31,98 (Sangat Kurang).
6. Kepada setiap pimpinan unit organisasi dihimbau agar:
 - a. melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga,
 - b. mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP untuk unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaan,
 - c. memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing,
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing, dan
 - e. menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Maret 2023
7. Hasil monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran yang secara lebih lengkap beserta rekomendasinya dapat dilihat pada Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Februari 2023 (sebagaimana terlampir).
8. Dalam hal membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdr. Rangga Lazuardi (0857-7748-2090).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Plt. Sekretaris Utama
3. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
4. Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
5. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
6. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LAPORAN MONITORING & EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI MARET 2023

Biro Perencanaan dan Keuangan
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

SUMMARY

CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Sasaran Strategis

LKPP Mempunyai 2 Tujuan dengan 8 Indikator



Sasaran Kegiatan

LKPP Memiliki 35 Sasaran Kegiatan dengan 53 Indikator



Rincian Output

LKPP Memiliki 69 Rincian Output

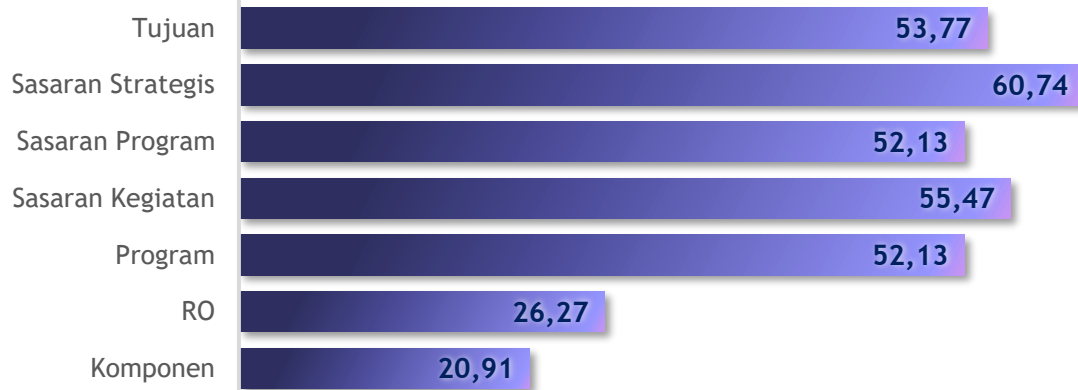


Komponen

LKPP Memiliki 202 Komponen dari 69 Rincian



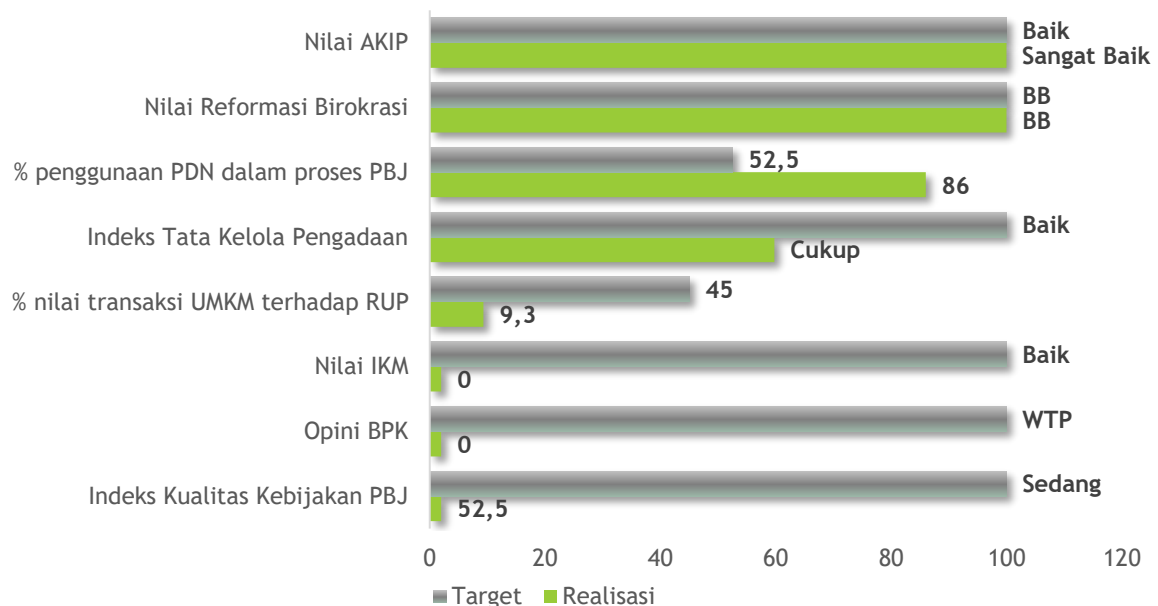
Capaian Fisik



■ CAPAIAN (%)



Sasaran Strategis

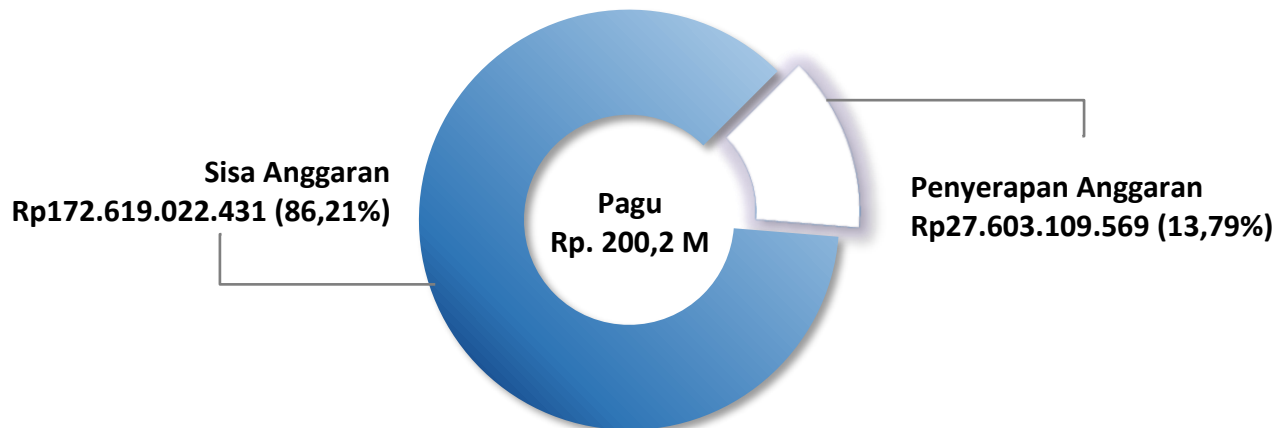


SUMMARY

PENYERAPAN ANGGARAN



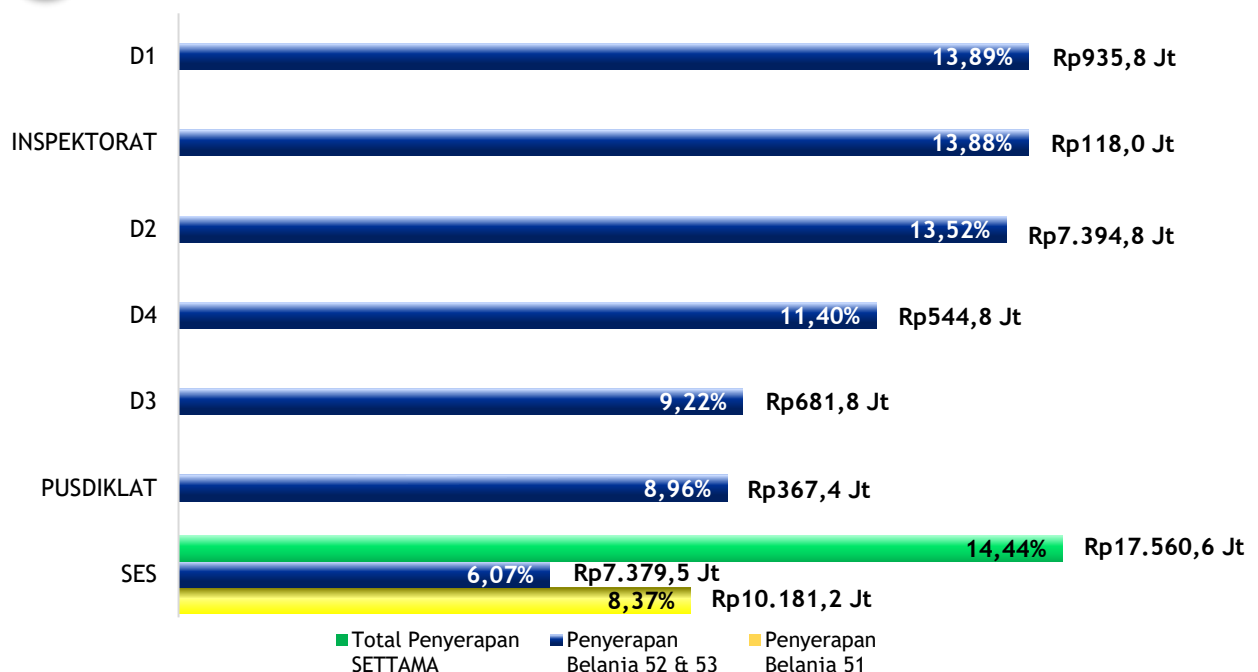
Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2023 berdasarkan aplikasi MonSAKTI



*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan tgl 31 Maret 2023



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. I dan Unor Es. II Mandiri TA 2023 berdasarkan aplikasi MonSAKTI

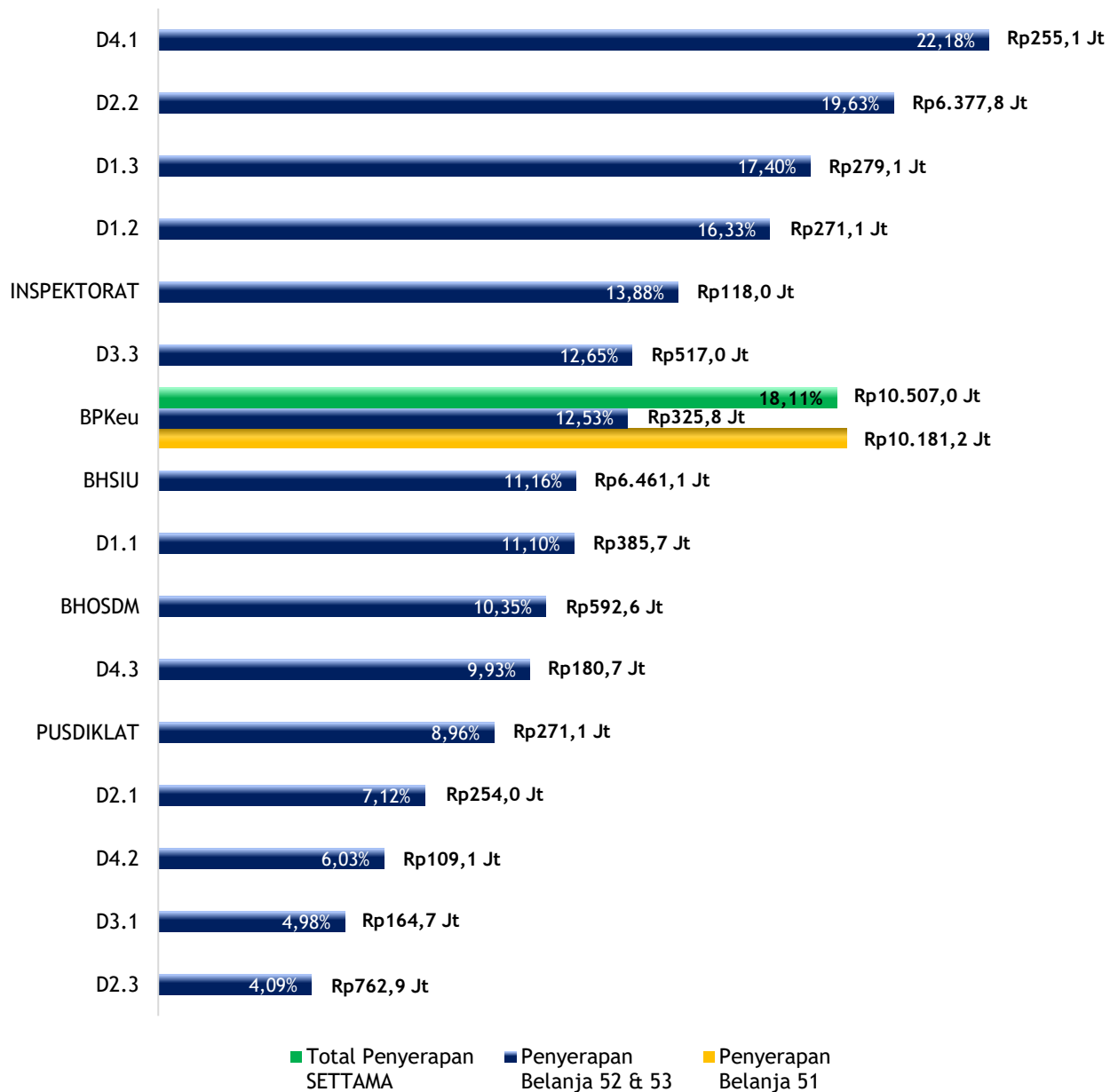


Berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar

terdapat pada Kedeputan Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan (13,89% - Rp935.785.346) dan terkecil terdapat pada Sekretariat Utama (6,07% - Rp7.379.458.347).



Realisasi Penyerapan Anggaran Per Unor Es. II



Berdasarkan perbandingan antara pagu dengan realisasi penyerapan anggaran masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Unit Organisasi Eselon II Mandiri, didapatkan persentase realisasi penyerapan anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dimana persentase penyerapan belanja 52 & 53 terbesar terdapat pada Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (22,18% - Rp255.058.720) dan terkecil terdapat pada Direktorat Pasar Digital Pengadaan (4,09% - Rp762.939.746).

PERBANDINGAN

RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) DENGAN REALISASI ANGGARAN

No.	Unit Organisasi	RPD Maret (Rp)	Realisasi Anggaran Maret (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (4) – (3)	(6) (5) / (3)
1	BHOSDM	640.328.986	429.583.767	-210.745.219	-32,91%
2	BHSIU	4.080.919.340	2.906.962.277	-1.173.957.063	-28,77%
3	BPKeu	243.356.800	190.038.996	-53.317.804	-21,91%
4	BPKeu (Belanja Pegawai)	4.069.144.333	4.739.203.132	670.058.799	16,47%
5	D1.1	200.395.000	179.554.558	-20.840.442	-10,40%
6	D1.2	380.014.000	195.224.580	-184.789.420	-48,63%
7	D1.3	200.969.000	199.702.386	-1.266.614	-0,63%
8	D2.1	137.211.917	144.457.523	7.245.606	5,28%
9	Katalog	1.026.134.000	574.958.655	-451.175.345	-43,97%
10	SPSE	1.726.177.249	3.270.053.950	1.543.876.701	89,44%
11	D3.1	231.080.918	106.033.227	-125.047.691	-54,11%
12	D3.3	289.007.000	378.958.180	89.951.180	31,12%
13	D4.1	93.265.000	57.814.137	-35.450.863	-38,01%
14	D4.2	93.642.000	103.584.711	9.942.711	10,62%
15	D4.3	104.624.000	76.401.809	-28.222.191	-26,97%
16	INSPEKTORAT	36.270.000	63.316.260	27.046.260	74,57%
17	PUSDIKLAT	300.393.250	217.200.736	-83.192.514	-27,69%
TOTAL LKPP		13.852.932.793	13.833.048.884	-19.883.909	-0,14%

Catatan:

- * 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar $\pm 5\%$ untuk nilai maksimum IKPA LKPP;
 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.
 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD
 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD
 5. Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan, adalah penyerapan anggaran parsial bulan Maret tahun 2023
- Perlu ditingkatkan nilai Realisasi Anggran mengacu kepada RPD
- Realisasi Anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar 5%

DAFTAR ISI

Summary	2
Daftar Isi	6
BAB I Monitoring Dan Evaluasi Lembaga	9
1.1 Anggaran	9
A. Pagu Anggaran	9
B. Penyerapan Anggaran	10
1.2 Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	11
1.3 Komitmen/Kontrak	13
1.4 Pelaporan Eksternal	15
A. Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) smart Kementerian Keuangan	15
B. Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas	16
BAB II Monitoring Dan Evaluasi Unit Organisasi	18
2.1 Biro Perencanaan dan Keuangan	18
A. Capaian Kinerja Fisik	18
B. Capaian Kinerja Anggaran	19
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	19
D. Rekomendasi	19
2.2 Biro Hukum, organisasi dan sumber daya manusia	21
A. Capaian Kinerja Fisik	21
B. Capaian Kinerja Anggaran	22
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	22
D. Rekomendasi	22
2.3 Biro Hubungan masyarakat, Sistem Informasi Dan umum	24
A. Capaian Kinerja Fisik	24
B. Capaian Kinerja Anggaran	25
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	25
D. Rekomendasi	26
2.4 Direktorat pengembangan strategi dan kebijakan pengadaan umum	28
A. Capaian Kinerja Fisik	28
B. Capaian Kinerja Anggaran	28
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi	29
D. Rekomendasi	29
2.5 Direktorat Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Pengadaan Khusus	31
A. Capaian Kinerja Fisik	31

B. Capaian Kinerja Anggaran.....	32
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	32
D. Rekomendasi	32
2.6 Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional	34
A. Capaian Kinerja Fisik	34
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	35
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	35
D. Rekomendasi	35
2.7 Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, Dan Evaluasi Pengadaan.....	37
A. Capaian Kinerja Fisik	37
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	38
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	38
D. Rekomendasi	39
2.8 Direktorat Sistem Pengadaan Digital	41
A. Capaian Kinerja Fisik	41
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	42
C. Kendala/Permasalahan	42
D. Rekomendasi	43
2.9 Direktorat Sistem Pasar Digital Pengadaan	45
A. Capaian Kinerja Fisik	45
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	46
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	46
D. Rekomendasi	47
2.10 Direktorat Pengembangan Profesi Dan Kelembagaan	49
A. Capaian Kinerja Fisik	49
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	50
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	50
D. Rekomendasi	50
2.11 Direktorat Sertifikasi Profesi	52
A. Capaian Kinerja Fisik	52
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	52
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	53
D. Rekomendasi	53
2.12 Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat.....	54
A. Capaian Kinerja Fisik	54

B. Capaian Kinerja Anggaran.....	54
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	55
D. Rekomendasi	55
2.13 Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah.....	56
A. Capaian Kinerja Fisik	56
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	56
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	57
D. Rekomendasi	57
2.14 Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum	59
A. Capaian Kinerja Fisik	59
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	60
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	60
D. Rekomendasi	60
2.15 Inspektorat.....	62
A. Capaian Kinerja Fisik	62
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	63
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	63
D. Rekomendasi	63
2.16 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.....	65
A. Capaian Kinerja Fisik	65
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	66
C. Catatan Monitoring dan Evaluasi.....	66
D. Rekomendasi	66
BAB III Kesimpulan	68

BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

1.1 ANGGARAN

A. Pagu Anggaran

Pagu LKPP sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar **Rp200.222.132.000**. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	27,67%
52 Belanja Barang	118.644.545.000	59,26%
53 Belanja Modal	26.168.425.000	13,07%
TOTAL	200.222.132.000	100,00%

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi LKPP adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
SETAMA	55.409.162.000	58.119.979.000	8.123.096.000	121.652.237.000
BHOSDM	-	5.728.000.000	-	5.728.000.000
BHSIU	-	49.811.979.000	8.103.096.000	57.915.075.000
BPKeu	-	2.580.000.000	20.000.000	2.600.000.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	55.409.162.000	-	-	55.409.162.000
Kedeputan 1 (D1)	-	6.738.500.000	-	6.738.500.000
D1.1	-	3.475.000.000	-	3.475.000.000
D1.2	-	1.660.000.000	-	1.660.000.000
D1.3	-	1.603.500.000	-	1.603.500.000
Kedeputan 2 (D2)	-	37.241.468.000	17.463.509.000	54.704.977.000
D2.1	-	3.180.080.000	390.000.000	3.570.080.000
D2.2	-	24.208.105.000	8.282.352.000	32.490.457.000
D2.3	-	9.853.283.000	8.791.157.000	18.644.440.000
Kedeputan 3 (D3)	-	7.396.418.000	-	7.396.418.000
D3.1	-	3.309.918.000	-	3.309.918.000
D3.3	-	4.086.500.000	-	4.086.500.000
Kedeputan 4 (D4)	-	4.780.000.000	-	4.780.000.000
D4.1	-	1.150.000.000	-	1.150.000.000
D4.2	-	1.810.000.000	-	1.810.000.000
D4.3	-	1.820.000.000	-	1.820.000.000
INSPEKTORAT	-	850.000.000	-	850.000.000

PUSDIKLAT	-	3.518.180.000	581.820.000	4.100.000.000
TOTAL	55.409.162.000	118.644.545.000	26.168.425.000	200.222.132.000

B. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023, penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar **Rp27.603.109.569** atau sebesar **13,79%**. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

- Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	10.181.190.851	18,37%	45.227.971.149
52 Belanja Barang	118.644.545.000	16.130.444.218	13,60%	102.514.100.782
53 Belanja Modal	26.168.425.000	1.291.474.500	4,94%	24.876.950.500
TOTAL	200.222.132.000	27.603.109.569	13,79%	172.619.022.431

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
SES	66.243.075.000	7.379.458.347	11,14%	58.863.616.653
D1	6.738.500.000	935.785.346	13,89%	5.802.714.654
D2	54.704.977.000	7.394.777.978	13,52%	47.310.199.022
D3	7.396.418.000	681.759.599	9,22%	6.714.658.401
D4	4.780.000.000	544.798.270	11,40%	4.235.201.730
INSPEKTORAT	850.000.000	117.975.615	13,88%	732.024.385
PUSDIKLAT	4.100.000.000	367.363.563	8,96%	3.732.636.437
Belanja Pegawai	55.409.162.000	10.181.190.851	18,37%	45.227.971.149
TOTAL	200.222.132.000	27.603.109.569	13,79%	172.619.022.431

- Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BHOSDM	5.728.000.000	592.624.639	10,35%	5.135.375.361
BHSIU	57.915.075.000	6.461.058.582	11,16%	51.454.016.418

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
BPKeu	2.600.000.000	325.775.126	12,53%	2.274.224.874
D1.1	3.475.000.000	385.650.695	11,10%	3.089.349.305
D1.2	1.660.000.000	271.062.581	16,33%	1.388.937.419
D1.3	1.603.500.000	279.072.070	17,40%	1.324.427.930
D2.1	3.570.080.000	254.018.994	7,12%	3.316.061.006
D2.2	32.490.457.000	6.377.819.238	19,63%	26.112.637.762
D2.3	18.644.440.000	762.939.746	4,09%	17.881.500.254
D3.1	3.309.918.000	164.727.881	4,98%	3.145.190.119
D3.3	4.086.500.000	517.031.718	12,65%	3.569.468.282
D4.1	1.150.000.000	255.058.720	22,18%	894.941.280
D4.2	1.810.000.000	109.059.131	6,03%	1.700.940.869
D4.3	1.820.000.000	180.680.419	9,93%	1.639.319.581
INSPEKTORAT	850.000.000	117.975.615	13,88%	732.024.385
PUSDIKLAT	4.100.000.000	367.363.563	8,96%	3.732.636.437
Belanja Pegawai	55.409.162.000	10.181.190.851	18,37%	45.227.971.149
TOTAL	200.222.132.000	27.603.109.569	13,79%	172.619.022.431

1.2 PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA

Berdasarkan revisi POK-3, pagu pengadaan LKPP adalah sebesar Rp144.812.970.000 (72,33%) dari pagu total LKPP. Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 03 April 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp111.124.906.200 atau sebesar 76,74% yang terdiri dari:

Jenis Pengadaan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Jasa Lainnya	389	Rp43.719.782.000	30,19%
Jasa Konsultansi	49	Rp20.289.834.000	14,01%
Barang	239	Rp18.405.622.200	12,71%
Pekerjaan Konstruksi	2	Rp3.142.416.000	2,17%
Swakelola	316	Rp25.567.252.000	17,66%
TOTAL	995	Rp111.124.906.200	76,74%

Metode Pemilihan	Jumlah Paket	Total Pagu Paket (Rp)	%
Pengadaan Langsung	430	Rp27.808.930.200	19,20%
e-Purchasing	165	Rp20.078.717.000	13,87%
Seleksi	28	Rp13.113.041.000	9,06%
Tender	9	Rp12.175.351.000	8,41%
Penunjukan Langsung	15	Rp11.236.843.000	7,76%
Dikecualikan	32	Rp1.144.772.000	0,79%
Swakelola	316	Rp25.567.252.000	17,66%
TOTAL	995	Rp111.124.906.200	76,74%

Adapun progres penayangan paket pengadaan barang/jasa per Unit Organisasi Eselon II adalah sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Unit Organisasi Eselon II	Pagu Pengadaan	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total Paket		Persentase Penayangan
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	
BHOSDM	5.728,00	62	2.603,10	34	2.796,91	0	0,00	96	5.400,01	94,27%
BHSIU	57.915,08	94	23.340,04	53	4.393,81	0	0,00	147	27.733,85	47,89%
BPKeu	2.600,00	0	0,00	10	1.232,38	17	1.367,62	27	2.600,00	100,00%
D1.1	3.475,00	4	925,00	49	2.205,50	6	343,30	59	3.473,80	99,97%
D1.2	1.660,00	0	0,00	12	491,78	32	1.456,90	44	1.948,68	117,39%
D1.3	1.603,50	0	0,00	12	1.274,70	7	328,80	19	1.603,50	100,00%
D2.1	3.570,08	54	3.129,24	8	40,84	0	0,00	62	3.170,08	88,80%
D2.2	32.490,46	82	29.389,63	30	1.689,33	0	0,00	112	31.078,96	95,66%
D2.3	18.644,44	40	12.404,41	23	4.223,04	0	0,00	63	16.627,46	89,18%
D3.1	3.309,92	0	0,00	11	1.975,81	34	1.264,11	45	3.239,92	97,89%
D3.3	4.086,50	0	0,00	17	1.411,93	72	2.674,57	89	4.086,50	100,00%
D4.1	1.150,00	6	298,56	7	169,69	18	680,39	31	1.148,64	99,88%
D4.2	1.810,00	0	0,00	6	517,40	39	1.292,60	45	1.810,00	100,00%

Unit Organisasi Eselon II	Pagu Pengadaan	Penyedia		Swakelola		Penyedia Dalam Swakelola		Total Paket		Persentase Penayangan
		Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	Jml	Rp	
D4.3	1.820,00	12	183,32	6	610,75	32	1.126,74	50	1.920,81	105,54%
INSPEKTORAT	850,00	12	446,74	18	803,16	0	0,00	30	1.249,90	147,05%
PUSDIKLAT	4.100,00	1	547,23	20	1.730,22	55	1.755,35	76	4.032,80	98,36%
TOTAL	144.812,97	367	73.267,27	316	25.567,25	312	12.290,39	995	111.124,91	76,74%

 Persentase Penayangannya Tidak 100%

Rata-rata persentase penayangan sebesar 76,74% dikarenakan masih terdapat unit organisasi yang melakukan proses revisi menayangkan paket pengadaan. Selisih pagu pengadaan dengan penayangan pada aplikasi SiRUP adalah sebesar Rp33.688.063.800.

1.3 KOMITMEN/KONTRAK

Berdasarkan aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan, sampai dengan 31 Maret 2023, LKPP memiliki 31 paket komitmen/kontrak yang didaftarkan. Adapun nilai total seluruh paket yang telah didaftarkan adalah **Rp35.813.173.126**. Berikut terlampir daftar 31 paket komitmen/kontrak tersebut:

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
1	Sewa Collocation Data Center DCI	2.597.400.000	324.675.000	2.272.725.000
2	Jasa Konsultasi Badan Usaha Pengembang Aplikasi Pendukung SPSE Terpusat	1.684.730.250	320.901.000	1.363.829.250
3	Pengadaan Sewa Communication Center (Call Center)	72.992.490	72.992.490	-
4	Jasa Konsultasi Badan Usaha Pengembang Aplikasi SPSE Terpusat	1.392.772.500	-	1.392.772.500
5	Sewa Internet Utama Operasional Direktorat PSPSE	888.000.000	74.000.000	814.000.000
6	Sewa Internet Data Center DCI Secondary	189.500.000	24.949.150	164.550.850
7	Sewa Internet Zoom Operasional Direktorat PSPSE	114.000.000	9.500.000	104.500.000
8	Sewa Internet Data Center DCI Primary	928.800.000	77.400.000	851.400.000
9	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Facility Management Gedung LKPP (Pemeliharaan)	595.984.911	49.665.409	546.319.502

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
10	Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Facility Management Gedung LKPP	11.944.171.377	928.850.698	11.015.320.679
11	Jasa Konsultansi Perorangan IT Software Architect	395.472.000	75.328.000	320.144.000
12	Jasa Konsultansi Perorangan Software Engineer	285.000.000	60.000.000	225.000.000
13	Jasa Konsultansi Perorangan System Analyst	199.500.000	39.900.000	159.600.000
14	Jasa Konsultansi Perorangan Senior Infrastructure Engineer	220.500.000	44.100.000	176.400.000
15	Langganan Internet	1.132.200.000	94.350.000	1.037.850.000
16	Jasa Konsultansi Perorangan Pengaman Enkripsi Data	161.000.000	28.000.000	133.000.000
17	Pengadaan Kendaraan Dinas Kepala LKPP (BHSIU)	601.900.000	601.900.000	-
18	Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Eselon II	1.685.236.800	-	1.685.236.800
19	Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengembang Aplikasi SPSE Terpusat (JAVA)	1.636.861.500	-	1.636.861.500
20	Pengadaan Lisensi Perangkat Security	2.025.000.000	2.025.000.000	-
21	Paket Pekerjaan Fullboard Pembahasan Pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dan Penyusunan Revisi Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021	174.768.000	174.768.000	-
22	Sewa Communication Center (Call Center) Tahun 2023	818.438.298	-	818.438.298
23	Fullboard Meeting Kegiatan Konsinyering Monitoring Keamanan Informasi LPSE	86.470.000	86.470.000	-
24	Pengadaan kendaraan dinas pejabat Eselon I (BHSIU)	3.598.100.000	-	3.598.100.000
25	Pengadaan Lisensi Nutanix	1.625.000.000	-	1.625.000.000
26	Pemeliharaan Pesawat Angkat dan Angkut (Gondola) di Gedung LKPP	135.000.000	-	135.000.000
27	Kegiatan Asesmen Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	251.800.000	-	251.800.000
28	Jasa Lainnya Pengelola Media Sosial Kepala LKPP	155.000.000	-	155.000.000
29	Fullday Meeting Pembahasan Penyusunan Dokumen Rencana Teknis dengan Telkom,	69.713.000	69.713.000	-

No	Uraian Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Nilai Sisa (Rp)
	Diskusi Koordinasi Keamanan Informasi untuk Tata Kelola Fungsi LPSE dan Diskusi Pengembangan Aplikasi SPSE dan Sistem Pendukungnya melalui Koordinasi Integrasi OSS			
30	Paket Fullboard Meeting Menghadiri rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kerja Biro Hubungan Masyarakat dan Umum Serta Penyusunan Rencana Revitalisasi Gedung LKPP TA 2023	91.572.000	-	91.572.000
31	Paket Pekerjaan Fullday Meeting Pembahasan Substansi Pengaturan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik dengan Panitia Antarkementerian dan/atau Non Kementerian (PAK)	56.290.000	-	56.290.000
TOTAL		35.813.173.126	8.876.262.075	26.936.911.051

1.4 PELAPORAN EKSTERNAL

A. Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) SMART Kementerian Keuangan

Aplikasi SMART DJA adalah sebuah aplikasi milik Kementerian Keuangan yang digunakan sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA K/L. Aplikasi ini menampilkan hasil nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Kementerian/Lembaga dari level Satker, Unit Eselon I hingga level Kementerian/Lembaga. Nilai EKA ini akan digunakan sebagai salah satu indikator pemberian penghargaan dan/atau sanksi atas kinerja anggaran Kementerian/Lembaga.



Gambar 1. 1 Tampilan Aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan

Nilai kinerja LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 04 April 2023 adalah sebesar 31,98 yang termasuk kedalam kategori Sangat Kurang, dengan rincian NKA Eselon I dan NKA Satuan Kerja sebagai berikut:

NKA Eselon I										Monitoring / NKA Eselon I
										Download Excel
Tampilkan 10 entri										Car:
No.	Kode Eselon I	Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata Rata Satker
1	00	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	33.70	21.26	10.44	74.86	1.00	-9.44	26.4	45.69
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri										Sebelumnya 1 Selanjutnya

NKA Satuan Kerja										Monitoring / NKA Satker
										Download Excel
Tampilkan 10 entri										Car:
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi		
1	970900	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	45,69	10,44	74,86	5,63	20,00	100,00		
Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri										Sebelumnya 1 Selanjutnya

B. Pelaporan Kinerja pada E-Monev Bappenas

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev bappenas dapat dilihat melalui tautan sebagai berikut: https://e-monev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-e-Monev_2021_v1_19032021.pdf.

Sampai dengan Maret 2023 LKPP belum dapat melaporkan capaian kinerja keseluruhan unit organisasi dikarenakan beberapa user aplikasi e-monev BAPPENAS belum dapat diakses/*login*. Saat ini Biro Perencanaan dan Keuangan masih terus berkoordinasi dengan tim teknis BAPPENAS.

BAB II

MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 9 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
1	01-Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pengelolaan anggaran	Indeks kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Sama dengan rata-rata nasional	Nilai IKPA = 73,01
2.	02-Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Predikat: Memuaskan

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
1	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 25%
2.	955-Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	4 Dokumen
3.	952-Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5 Dokumen	1 Dokumen
4.	953-Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	Progres: 27%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Maret 2023 adalah 19,11%.

3. Komponen

Tahun 2023, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki 9 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Maret 2023 adalah 25,44%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp58.009.162.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	10.181.190.851	18,37%	45.227.971.149
52 Belanja Barang	2.580.000.000	325.775.126	12,63%	2.254.224.874
53 Belanja Modal	20.000.000	-	-	20.000.000
Total	58.009.162.000	10.506.965.977	18,11%	47.502.196.023

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran BPKeu (parsial) sebesar Rp 190.038.996. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 243.356.800 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp 53.317.804 atau -21,91%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.
3. Terhadap RO Layanan Pemantauan dan Evaluasi, khususnya pada komponen 053 - Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, terdapat perubahan pegawai pada unit organisasi yang diusulkan menjadi asesor dengan pegawai yang mengikuti kegiatan Bimtek SPIP 2023, sehingga perlu penyesuaian pada draft SK Tim Asesor SPIP Tahun 2023 yang sudah diajukan ke BHOSDM untuk proses *legal drafting*.
4. Terhadap RO Layanan Perencanaan dan Penganggaran, khususnya pada 052-Penyusunan Anggaran:
 - a. terdapat revisi kenaikan gaji jasa lainnya pada beberapa unit organisasi tingkat eselon II yang memerlukan persetujuan KPA; dan
 - b. data dukung usulan pembukaan blokir belum disampaikan oleh BHU.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:

- a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan harus tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
1	01-Terselenggaranya sistem manajemen ASN yang mendukung profesionalitas SDM	01-Indeks profesionalitas ASN LKPP	Predikat: Sangat Tinggi	Progres: 64%
		02-Indeks sistem merit	Predikat: Sangat Baik	Progres: 33%
2.	02-Meningkatnya nilai reformasi birokrasi area penguatan perundang-undangan	01-Nilai reformasi birokrasi LKPP area penguatan peraturan perundang-undangan	Predikat: Sangat baik	Predikat: Sangat baik
3.	03-Terpenuhinya kualitas penerapan reformasi birokrasi	01-Jumlah rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	1 Rekomendasi	Progres:12%
		02-Laporan evaluasi organisasi dan tata laksana	1 Laporan	Progres: 51%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
1	957-Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 18,18%
2.	960-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	2 Layanan	Progres: 51%
3.	969-Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 34%
4.	954-Layanan Manajemen SDM	357 Orang	105 Orang
5.	961-Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	Progres: 12%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Maret 2023 adalah 28,84%.

3. Komponen

Tahun 2023, Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia memiliki 12 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Maret 2023 adalah 25,53%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran BHOSDM TA 2023 adalah sebesar Rp5.728.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	5.728.000.000	592.624.639	10,35%	5.135.375.361
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	5.728.000.000	592.624.639	10,35%	5.135.375.361

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2023, realisasi anggaran BHOSDM (parsial) sebesar Rp 429.583.767. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 640.328.986 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp 210.745.219 atau -32,91%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHOSDM adalah 94,27% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu pada paket pengadaan Jasa Konsultan Badan Usaha Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan belum dimulai dikarenakan sedang dilakukan persiapan dan perbaikan KAK Konsultan.
4. Pada paket pengadaan Konselor dan Pengadaan Jasa Konsultan asesmen CASN belum dimulai karena sedang dilakukan penyusunan KAK.
5. Terdapat beberapa rencana yang belum diperbarui status progresnya yang tertera pada menu rencana aplikasi SiREMOM.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Menyelesaikan perbaikan KAK dan segera memulai melakukan proses pengadaan pada paket Jasa Konsultan Badan Usaha Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
5. Memperbarui status progres rencana setiap bulannya pada menu Rencana di aplikasi SiREMON.

2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT, SISTEM INFORMASI DAN UMUM (BHSIU)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum (BHSIU) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 12 indikator Rincian Output, dan 27 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
1	01-Terwujudnya pelayanan tata kelola organisasi melalui pelaksanaan pengelolaan kearsipan	01-Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Sangat Baik	Progres: 15%
2.	02-Terpenuhinya kualitas penerapan pelayanan publik	01-Rekomendasi atas hasil evaluasi IKM	1 Rekomendasi	Progres: 16,66%
		02-Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks: Informatif	Progres: 27,05%
3.	03-Terwujudnya pelayanan internal LKPP melalui pelaksanaan pemenuhan sarana, prasarana dan kesekretariatan	01-Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I	Indeks: Cukup Puas	-
4.	04-Meningkatnya layanan dan sistem informasi yang andal dan responsif	01-Persentase sistem informasi terintegrasi yang dimanfaatkan dalam rangka menunjang proses bisnis internal LKPP	72,73 Persen	18 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
1	963-Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	1 Layanan	-
2.	963-Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1 Layanan	-
3.	956-Layanan BMN	1 Layanan	Progres: 25%
4.	958-Layanan Hubungan Masyarakat	4 Layanan	Progres: 16,04%
5.	959-Layanan Protokoler	1 Layanan	Progres: 25%
6.	962-Layanan Umum	1 Layanan	Progres: 24,95%
7.	963-Layanan Data dan Informasi	3 Layanan	Progres: 25%
8.	994-Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 25%
9.	951-Layanan Sarana Internal	101 Unit	Progres: 15%

No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret 2023
10.	971-Layanan Prasarana Internal	1 Unit	Progres: 15%
11.	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	Progres: 10%
12.	963-Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9 Sistem Informasi	-

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum pada bulan Maret 2023 adalah 15,08%.

3. Komponen

Tahun 2023, Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum memiliki 27 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Maret 2023 adalah 20,75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran BHSIU TA 2023 adalah sebesar Rp57.915.075.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada BHSIU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	49.811.979.000	5.859.158.582	11,76%	43.952.820.418
53 Belanja Modal	8.103.096.000	601.900.000	7,43%	7.501.196.000
Total	57.915.075.000	6.461.058.582	11,16%	51.454.016.418

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHSIU di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2023, realisasi anggaran BHSIU (parsial) sebesar Rp 2.906.962.277. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 4.080.919.340 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp 1.173.957.063 atau -28,77%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) BHSIU adalah 47,89% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terhadap kegiatan dan komponen yang terdapat pada RO sebagai berikut:
 - a. Layanan Data Warehouse Walidata LKPP
 - b. Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

- c. Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang masih terblokir dan saat ini sedang dalam proses pengajuan ke DJA.
- 4. Terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu:
 - a. RO Layanan Hubungan Masyarakat pada komponen dokumentasi dan peliputan, informasi permohonan peliputan sering kali diterima beberapa menit sebelum pelaksanaan, disisi lain humas sudah pernah mensosialisasikan SOP permohonan peliputan kepada seluruh Unor Es II;
 - b. Layanan Sarana Internal, dokumen administrasi yang diterima LKPP belum lengkap yaitu belum adanya BPKB kendaraan, sehingga BAST belum dilakukan; dan
 - c. Beberapa paket pengadaan yang belum di-*update* progres status pengadaannya pada bulan Maret 2023 serta paket pengadaan yang belum dimulai dikarenakan anggaran masih terblokir dan saat ini dalam proses *clearence*.
- 5. Terhadap RO Layanan Data dan Informasi, khususnya pada komponen 053 - Penyediaan Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, perangkat laptop pegawai masih menggunakan laptop sewa dengan kapasitas hardisk terbatas sehingga performa laptop menjadi lambat.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Membangun komunikasi yang intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan mengupdate informasi terhadap anggaran yang masih terblokir secara berkala.
5. Melakukan koordinasi internal dan meningkatkan kesiapan tim untuk melakukan peliputan.
6. Membangun komunikasi yang intensif kepada penyedia untuk mempercepat proses penerbitan BPKB agar BAST dapat segera diterbitkan.
7. Mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan performa laptop pegawai yang kurang maksimal.

8. Memperbarui atau meng-*update* progres status pengadaan pada menu pengadaan di aplikasi SiREMON dan segera memproses paket pengadaan yang belum dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 1 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret
1.	01-Tersedianya rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas	01-Jumlah rumusan strategi dan kebijakan pengadaan umum yang berkualitas	6 Rumusan	Progres: 15%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret
1	111-Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	6 Rancangan Peraturan	Progres: 21,94%
2.	111-Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	4 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 8,06%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.1 pada bulan Maret 2023 adalah 15%.

3. Komponen

Tahun 2023, D1.1 memiliki 6 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Maret 2023 adalah 13,03%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D1.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.475.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
---------------	-----------	----------------	------------	---------------

51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.475.000.000	385.650.695	11,1%	3.089.349.305
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	3.475.000.000	385.650.695	11,1%	3.089.349.305

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D1.1 (parsial) sebesar Rp179.554.558. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp200.395.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp20.840.442 atau -10,40%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.1 adalah 99,97%, hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terdapat permasalahan pengadaan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu masih dalam tahap reviu KAK dan HPS. Selain itu, terdapat beberapa paket pengadaan yang direvisi menjadi secara swakelola serta dialihkan menjadi paket meeting dan belanja jasa profesi.
4. Terkait dengan RO Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kendala berupa:
 - a. Belum adanya kepastian waktu revisi Perpres diundangkan
 - b. Saat ini beban kerja difokuskan untuk penyusunan RUU PBJ Publik
5. Terkait dengan Komponen Diseminasi Implementasi Strategi Kebijakan Pengadaan Umum, terdapat selisih yang besar antara realisasi kegiatan (29 kegiatan dari target 30 kegiatan) dengan capaiannya (17,52%).

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.

3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya, selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Segera memproses paket pengadaan dengan memperhatikan waktu yang telah ditetapkan.
5. Terkait dengan RO Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumberdaya Manusia guna mendapatkan *update* informasi terkait diundangkannya revisi Perpres.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan guna mendapatkan alternatif solusi terhadap target kegiatan yang diluar RO tersebut.
6. Dalam rangka menghitung capaian kinerja fisik terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu membandingkan realisasi dengan target atau dengan metode pengecualian. Dimohon agar dalam pengisian capaian memperhatikan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, Kerangka Acuan Kerja, dokumen lainnya) yang telah disusun agar data dan/atau informasi yang disampaikan valid serta akuntabel.

2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	02-Tersedianya strategi/kebijakan pengadaan khusus yang berkualitas	01-Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di BLU/BLUD	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 15,67%
		02-Dokumen kebijakan pengadaan KPBU	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 15,67%
		03-Dokumen kebijakan pengadaan barang/jasa di desa	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 15,67%
2.	03-Terselenggaranya pendampingan/pemberian pendapat kebijakan pengadaan khusus	01-Dokumen pendampingan penyusunan pedoman peraturan PBJ di Badan Usaha, BLU/BLUD Badan Hukum Publik, KPBU dan Desa	3 Dokumen	Progres: 10%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1	124-Model Dokumen PBJ Khusus	3 NSPK	Progres: 15,67%
2.	123-Instansi/Proyek yang Mendapat Pendampingan dalam PBJ Khusus	10 Lembaga	Progres: 25,95%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.2 pada bulan Maret 2023 adalah 20,81%.

3. Komponen

Tahun 2023, D1.2 memiliki 6 Komponen dan rata-rata progres komponen pada bulan Maret 2023 adalah 20,81%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D1.2 TA 2023 adalah sebesar Rp1.660.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.660.000.000	271.062.581	16,33%	1.388.937.419
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.660.000.000	271.062.581	16,33%	1.388.937.419

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D1.2 (parsial) sebesar Rp195.224.580. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp380.014.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp184.789.420 atau -48,63%.
2. Persentase penayangan Rencana Umum Pengadaan (RUP) D1.2 adalah 117,39%, hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Penginputan Rencana Aktivitas dan Rencana Penarikan Anggaran/Dana (RPA/RPD) pada SIREMON (<https://siremon.lkpp.go.id/rpa>) agar dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Terkait dengan kegiatan penyusunan dokumen kebijakan KPBU, dan/atau Desa, terdapat beberapa masalah yang sama dengan bulan sebelumnya:
 - a. Sulitnya penyamaan persepsi antara para pihak terkait dengan penyusunan MDP KPBU IKN dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Desa;
 - b. Sulitnya identifikasi prioritas penyusunan MDP KPBU IKN; dan
 - c. Sulitnya identifikasi Peraturan Kepala Daerah.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya, selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. Melakukan penginputan Rencana Aktivitas dan RPA/RPD pada SiREMON (<https://siremon.lkpp.go.id/rpa>) sesuai dengan waktu yang diberikan oleh BPKeu untuk setiap triwulan.
5. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menghambat proses pengumpulan data dan informasi kajian kerjasama operasional pada BLUD dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret
1.	04-Terpenuhinya kebijakan PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Jumlah kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kerangka kerjasama internasional	1 Dokumen Kebijakan	Progres: 10%
2.	01-Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam PBJ	01-Peningkatan jumlah pelaku usaha UMK yang terlibat dalam PBJP	252 Pelaku Usaha	Progres: 15%

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres s.d Maret
1.	131-Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional	3 Kesepakatan	Progres: 26%
2.	131-Badan Usaha yang Difasilitasi dalam Peluang Akses PBJ Internasional	500 Badan Usaha	Progres: 10,5%
3.	131-NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 NSPK	Progres: 15%
4.	132-Pelaku UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	1240 UMKM	503 UMKM

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D1.3 pada bulan Maret 2023 adalah 19,13%.

3. Komponen

Tahun 2023, D1.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Maret 2023 adalah 15,75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D1.3 TA 2023 adalah sebesar Rp1.603.500.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.603.500.000	279.072.070	17.4%	1.324.427.930
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.603.500.000	279.072.070	17.4%	1.324.427.930

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D1.3 (parsial) sebesar Rp199.702.386. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp200.969.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp1.266.614 atau -0,63%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.
3. Terkait dengan RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 - a. Terdapat permasalahan pengadaan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu Pengadaan berkelanjutan pada sektor kontruksi dan sektor konsultasi tergolong baru dan belum banyak informasi, serta melihat SDM dan anggaran yang tidak banyak, sehingga diperlukan penggalian informasi, literatur dan analisis yang membutuhkan waktu cukup panjang;
 - b. SDM banyak mendapatkan tugas tambahan, sehingga belum dapat fokus pada kegiatan utama;
 - c. Banyaknya undangan dan kegiatan dari luar, sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan terkendala.
4. Terkait RO Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional terdapat permasalahan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk kegiatan perundingan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya, selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Terkait dengan RO NSPK Pengadaan Berkelanjutan dalam PBJP, agar melakukan identifikasi serta merumuskan strategi untuk mengatasi kendala pada proses pengumpulan data dan informasi Pengadaan berkelanjutan pada sektor konstruksi dan sektor konsultasi, manajemen SDM serta kegiatan yang diinisiasi oleh pihak eksternal dengan sumber daya yang dimiliki.
4. Terkait dengan RO Hasil Kesepakatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Kerangka Kerjasama Perdagangan Internasional, agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada serta berkoordinasi dengan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan (D2.1) memiliki 5 indikator sasaran kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	01-Meningkatnya kualitas sistem informasi perencanaan pengadaan yang mendorong produk dalam negeri dan meningkatnya partisipasi UMK	01-Persentase paket pengadaan yang dicadangkan bagi UMK dalam Rencana Umum Pengadaan	50 Persen	34,5 Persen
		02-Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan	52,5 Persen	61,3 Persen
2.	02-Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan monev pengadaan	01-Persentase realisasi penayangan Rencana Umum Pengadaan di dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	75 Persen	82 Persen
		02-Capaian indeks kinerja pengadaan barang/jasa	Indeks: 35	Indeks 34,40
3.	03-Terwujudnya peningkatan efektivitas proses pengadaan melalui sistem informasi yang terintegrasi	01-Jumlah pengembangan, integrasi, dan implementasi sistem perencanaan dan monitoring-evaluasi pengadaan	6 Segmen	5 Segmen

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	211-Dokumen Rencana Pengembangan Aplikasi Perencanaan Pengadaan	1 Dokumen	Progres: 13,50%
2.	211-Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja PBJP	2 Laporan	Progres: 10,36%
3.	211-Sistem Perencanaan PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 30%
4.	212-Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 7%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.1 pada bulan Maret 2023 adalah 15,22%.

3. Komponen

Tahun 2023, D2.1 memiliki 11 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Maret 2023 adalah 11,14%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D2.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.570.080.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.180.080.000	254.018.994	7,99%	2.926.061.006
53 Belanja Modal	390.000.000	-	0%	390.000.000
Total	3.570.080.000	254.018.994	7,12%	3.316.061.006

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi penyerapan anggaran D2.1 (parsial) adalah sebesar Rp144.457.523 dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp137.211.917 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp7.245.606 atau 5,28%.

2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.1 adalah 88,80% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Pada Indikator Sasaran Program Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa, realisasi sampai dengan bulan Maret 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 86 persen dari target sebesar 52,5 persen.
4. Pada Indikator Sasaran Kegiatan Persentase penggunaan produk dalam negeri pada paket pengadaan dalam Rencana Umum Pengadaan, realisasi sampai dengan bulan Maret 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 61,3 persen dari target sebesar 52,5 persen.
5. Masih terdapat kendala yang sama seperti pada bulan sebelumnya pada RO Sistem Monitoring Evaluasi PBJP Terintegrasi yaitu:
 - a. Pada komponen Pengembangan Sistem Monitoring Evaluasi PBJP BRIN tidak berkenan untuk menjalin kerjasama pembangunan *data warehouse* AMEL sehingga ada wacana akan diserahkan ke Telkom.
 - b. Pada komponen Penyelenggaraan Sistem Aplikasi Monitoring-Evaluasi Lokal (AMEL) terdapat beberapa kendala yang dilaporkan oleh pengguna aplikasi (*user*) adalah terkait masalah teknis seperti tidak tampilnya data di AMEL.
6. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang terdapat pada tautan (<https://siremon.lkpp.go.id/rpa>) belum dilakukan pengisian sehingga masih kosong.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Terkait dengan adanya indikator Sasaran Progran dan Sasaran Kegiatan yang sejak bulan Februari 2023 realisasinya telah melebihi target agar berkoordinasi secara resmi melalui Nota Dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023,

4. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan kerjasama pembangunan datawarehouse AMEL dengan BRIN dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki,
5. Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terkait dengan tidak tampilnya data pada aplikasi AMEL dengan melibatkan pengguna/*user*.
6. Memperbarui atau meng-*update* progres status pengadaan pada menu pengadaan di aplikasi SiREMON,
7. Melakukan penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada SiREMON (<https://siremon.lkpp.go.id/rpa>) pada triwulan berikutnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, serta meng-*update* rencana kegiatan pada menu Rencana di Aplikasi SiREMON setiap bulannya.

2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) memiliki 6 indikator Sasaran Kegiatan, 3 indikator Rincian Output, dan 8 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	07-Terpenuhinya integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya	01-Jumlah LPSE yang menggunakan aplikasi SPSE Terpusat	300 LPSE	170 LPSE
		02-Persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya	80 Persen	63 Persen
		03-Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing	52,5 Persen	79,68 Persen
		04-Persentase nilai transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP	45 Persen	50,04 Persen
2.	08-Terpenuhinya standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik	01-Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik	35 Persen	Progres: 10 Persen
3.	09-Terpenuhinya fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan layanan dukungan pengguna yang berkualitas	01-Persentase pemenuhan layanan dukungan pengguna sistem pengadaan secara elektronik	100 Persen	17 Persen

 Target telah tercapai

2. Rincian Output

No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	231-SPSE Terpusat	300 Layanan	170 Layanan
2.	234-Pedoman Tata Kelola LPSE	1 Pedoman	Progres: 5 Persen
3.	231-Penerima Layanan Dukungan Pengguna SPSE	10.400 Orang	3379 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.2 pada bulan Maret 2023 adalah 19,67%.

3. Komponen

Tahun 2023, D2.2 memiliki 8 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Maret 2023 adalah 15,83%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D2.2 TA 2023 adalah sebesar Rp32.490.457.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	24.208.105.000	3.014.365.288	12,45%	21.193.739.712
53 Belanja Modal	8.282.352.000	93.400.000	1,13%	8.188.952.000
Total	32.490.457.000	3.107.765.288	9,57%	29.382.691.712

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.2 di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2023, realisasi anggaran D2.2 (parsial) sebesar Rp 3.100.022.699. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 1.517.607.249 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 1.582.415.450 atau 104,27%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.2 adalah 98,30% yang ditayangkan, hal ini dikarenakan rencana pengadaan yang diinputkan pada aplikasi SIRUP belum seluruhnya ditayangkan.

3. Pada Indikator Sasaran Kegiatan persentase integrasi sistem informasi pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, dan pengelolaan penyedia dengan sistem informasi lainnya, terdapat perubahan dalam pedoman integrasi antara sistem SPSE dengan SPBE K/L Lainnya.
4. Pada Indikator Sasaran Kegiatan Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing:
 - a. D2.2 tidak dapat mewajibkan K/L/PD untuk mengalokasikan seluruh pengadaan dijadikan paket PDN, hal ini disebabkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan yang sangat dinamis;
 - b. realisasi sampai dengan bulan Februari 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 79,68 persen dari target sebesar 52,5 persen.
5. Pada Indikator Sasaran Kegiatan Persentase nilai transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP:
 - a. D2.2 tidak dapat mewajibkan K/L/PD untuk menyusun seluruh alokasi RUP untuk dijadikan paket usaha kecil karena kebutuhan dan realita di lapangan sangat dinamis; dan
 - b. realisasi sampai dengan bulan Februari 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 50,04 persen dari target sebesar 45 persen.
6. Pada indikator Sasaran Kegiatan Persentase pemenuhan standar tata kelola layanan pengadaan secara elektronik, masih terdapat permasalahan yang sama dengan bulan lalu yaitu adanya perubahan konsep standar terbaru sehingga perlu dilakukan penyamaan persepsi penilai terhadap konsep standar terbaru tersebut.
7. Terhadap RO Pedoman Tata Kelola LPSE pada komponen Pengumpulan Data dan Informasi, diperlukan penyesuaian dengan Perpres 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transformasi Digital Pengadaan, dan adanya pemotongan anggaran belanja paket meeting dalam kota.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi harus:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. D2.2 melakukan identifikasi dan perencanaan yang mendalam pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana

Penarikan Dana, karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.

2. Memperbarui pengisian rencana pengadaan pada aplikasi SiRUP sesuai dengan pagu pengadaan agar nilai rencana pengadaan yang ditayangkan sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
4. D2.2 perlu membangun strategi komunikasi yang intensif dan efektif antar K/L dalam melakukan integrasi antara sistem SPSE dengan SPBE K/L Lainnya.
5. Terkait dengan indikator Sasaran Kegiatan Persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui non e-Purchasing dan Sasaran Kegiatan Persentase nilai transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing terhadap RUP, agar:
 - a. Melakukan monitoring kepada seluruh K/L/PD atas penggunaan PDN serta transaksi UMK dalam PBJ.
 - b. Mendorong seluruh K/L/Pemda untuk menggunakan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui purchasing maupun non e-Purchasing dan meningkatkan transaksi UMK dalam pengadaan melalui non e-Purchasing.
6. Membuka forum diskusi dan komunikasi kepada seluruh *stakeholder* terkait, guna memperoleh kesamaan persepsi penilai terhadap konsep standarisasi yang terbaru.
7. Mengundang narasumber untuk melakukan pengumpulan data dan informasi melalui kegiatan diskusi untuk penerapan standarisasi tata kelola LPSE terbaru yang disesuaikan dengan Perpres 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transformasi Digital Pengadaan.

2.9 DIREKTORAT SISTEM PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pasar Digital Pengadaan (D2.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 12 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	02-Meningkatnya kualitas e-purchasing yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UMK	01-Persentase peningkatan peran serta UKM pada Katalog Elektronik	45 Persen	74,3 Persen
		02-Jumlah produk dalam negeri yang tayang dalam Katalog Elektronik	2.000.000 Produk	3.585.467 Produk
2.	04-Meningkatnya pemanfaatan sistem e-purchasing	01-Persentase penyelesaian paket pengadaan E-Purchasing	80 Persen	20 Persen
3.	05-Terpenuhinya integrasi katalog elektronik dan e-purchasing dengan sistem lainnya	01-Jumlah integrasi Sistem Informasi Katalog Elektronik dan E-Purchasing dengan sistem lainnya.	5 Segmen	5 Segmen

 Target telah tercapai

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	221-Pedoman Sistem Katalog dan Toko Daring	2 Pedoman	Progres: 35%
2.	221-Produk yang Masuk <i>e-Catalogue</i>	2.000.000 Produk	3.585.467 Produk
3.	221-Rekomendasi Monitoring dan Evaluasi Katalog Elektronik	1 Laporan	Progres: 25%
4.	221-Sistem <i>e-Purchasing</i> Terintegrasi	1 Sistem Informasi	Progres: 15%

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D2.3 pada bulan Maret 2023 adalah 25%.

3. Komponen

Tahun 2023, D2.3 memiliki 12 Komponen dan rata-rata capaian komponen pada bulan Maret 2023 adalah 21,53%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D2.3 TA 2023 adalah sebesar Rp18.644.440.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran (Rp)
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	9.853.283.000	762.939.746	7,74%	9.090.343.254
53 Belanja Modal	8.791.157.000	-	0%	8.791.157.000
Total	18.644.440.000	762.939.746	4,09%	17.881.500.254

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi penyerapan anggaran D2.3 (parsial) adalah sebesar Rp574.958.655, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp1.026.134.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp451.175.345 atau -43,97%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D2.3 adalah 89,18% yang ditayangkan, hal ini karena rencana pengadaan belum seluruhnya diinput pada aplikasi SIRUP sesuai dengan pagu pengadaan.
3. Terkait dengan Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas e-purchasing yang mendorong produk dalam negeri dan partisipasi UMK terdapat kendala pada proses penarikan data pada Dashboard Monev Katalog yang seringkali terjadi perbedaan data dikarenakan sistem/server yang berat.
4. Terkait dengan indikator Sasaran Kegiatan Persentase penyelesaian paket pengadaan *e-purchasing* terdapat permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya yaitu, mayoritas PP/PPK pada K/L/Pd belum menyelesaikan paket sampai dengan serah terima.
5. Terkait dengan Rincian Output indikator Sistem E-Purchasing Terintegrasi:

- a. Proses administrasi penandatanganan PKS terhambat karena ada perubahan nomenklatur dan pergantian pimpinan sehingga perlu dikoordinasikan kembali dengan pihak Kemkumham; dan
 - b. Proses implementasi KKP dan Qris pada Katalog Elektronik mengharuskan LKPP menjadi Wajib Pungut Pajak sebagai PPMSE.
6. Pada Indikator Sasaran Kegiatan dan Rincian Output Jumlah produk yang masuk e-catalogue, realisasi sampai dengan bulan Maret 2023 sudah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 3.585.467 produk dari target sebesar 2.000.000 produk.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu; dan
 - c. D2.3 melakukan identifikasi dan perencanaan yang mendalam pada saat merencanakan dan menyusun Rencana Penarikan Dana, sehingga meminimalisir deviasi yang besar antara realisasi penyerapan anggaran dengan Rencana Penarikan Dana, karena akan berpengaruh terhadap nilai IKPA unit organisasi dan IKPA LKPP.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. D2.3 harus membuat media informasi tentang tata cara penyelesaian paket pengadaan *e-purchasing* dan menyebarluaskan informasi tersebut kepada para PPK di seluruh K/L/PD agar memahami penyelesaian paket sampai dengan serah terima.
4. Pada Rincian Output indikator Sistem E-Purchasing Terintegrasi:
 - a. Terkait dengan Proses administrasi penandatanganan PKS agar selalu memonitor dan meng-*update* progres status perubahan nomenklatur di Kemkumham dan berkoordinasi dengan Biro Humas, Sistem Informasi dan Umum dan Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM); dan
 - b. Terkait dengan proses implementasi KKP dan Qris pada Katalog Elektronik agar memastikan kembali aturan pembayaran pada Proses implementasi KKP dan Qris pada Katalog Elektronik tidak bertentangan dengan aturan keuangan di LKPP.

5. Terkait dengan Indikator Sasaran Kegiatan dan Rincian Output Jumlah produk yang masuk e-catalogue yang realisasinya telah melebihi target agar menginformasikan dan berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023.
6. Memperbarui atau meng-*update* progres status pengadaan pada menu pengadaan di aplikasi SiREMON.

2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 4 indikator Rincian Output, dan 11 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	01-Jumlah SDM PBJ yang kompeten	4.575 Orang	7.079 Orang
		02-Persentase pemenuhan regulasi standar kompetensi PBJ	80 Persen	16 Persen
2.	02-Terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan	01-Jumlah UKPBJ K/L/Pemda yang mencapai tingkat kematangan minimal level 3	290 UKPBJ	203 UKPBJ

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	311-Rekomendasi Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 20 Persen
2.	311-SDM JF PPBJ	4.475 Orang	6780 Orang
3.	312-Pedoman Pengembangan Kompetensi Teknis Kepala UKPBJ	1 Pedoman	Progres: 5 Persen
4.	311-UKPBJ yang Mencapai Maturitas (Level 3)	290 Lembaga	203 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.1 pada bulan Maret 2023 adalah 15,75%.

3. Komponen

Tahun 2023, D3.1 memiliki 11 Komponen dari 4 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Maret 2023 adalah 13,18%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D3.1 TA 2023 adalah sebesar Rp3.309.918.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.309.918.000	164.727.881	4.98%	3.145.190.119
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	3.309.918.000	164.727.881	4.98%	3.145.190.119

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D3.1 (parsial) sebesar Rp 106.033.227. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 231.080.918 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp 125.047.691 atau -54,11%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) ditayangkan 97,89%.
3. Dibutuhkan personel yang memiliki latar belakang sistem informasi untuk pengelolaan sistem dan data untuk mendorong terwujudnya UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan.
4. Masih terdapatnya revisi dari Pusdiklat dan DSP dalam pembuatan rekomendasi kompetensi teknis dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan harus tepat waktu.
2. Melakukan monitoring terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Berkoordinasi dengan BHOSDM dan Pusdatin guna mendapatkan alternatif solusi terkait personil yang diperbantukan untuk pengelolaan sistem dan data.

4. Berkoordinasi secara aktif dengan Pusdiklat dan DSP terkait masukan dan saran untuk proses penyelesaian rekomendasi kebijakan terkait Kompetensi Teknis di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 1 indikator sasaran kegiatan, 6 indikator Rincian Output, dan 17 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	03-Terwujudnya kapasitas SDM dan mutu layanan sertifikasi PBJP	01-Tingkat keterandalan sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah	90 Persen	8,89 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	331-Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	34 Lembaga	12 Lembaga
2.	331-Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	75 Orang	0 Orang
3.	331-Peserta Sertifikasi SDM PBJ	5.450 Orang	2.039 Orang
4.	331-Pedoman Sertifikasi PBJP	1 Pedoman	Progres: 13,25 Persen
5.	332-Materi Uji Sertifikasi PBJP	20 NSPK	3 NSPK
6.	331-Sarana Sertifikasi PBJP	196 Unit	48 Unit

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D3.3 pada bulan Maret 2023 adalah 19,02%.

3. Komponen

Tahun 2023, D3.3 memiliki 17 Komponen dari 6 Rincian Output dan rata-rata capaian komponen pada bulan Maret 2023 adalah 26,26%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D3.3 TA 2023 adalah sebesar Rp4.086.500.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-

52 Belanja Barang	4.086.500.000	517.031.718	12,65%	3.569.468.282
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	4.086.500.000	517.031.718	12,65%	3.569.468.282

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D3.3 (parsial) sebesar Rp 378.958.180. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp 289.007.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 89.951.180 atau 31,12%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) D3.3 telah 100% ditayangkan.
3. Kekurangan personil yang tersedia dalam tim Sertifikasi PBJP dengan beban kerja yang harus diselesaikan.
4. Terjadinya koordinasi yang rumit dan kompleks sehingga menyebabkan mundurnya timeline proyek untuk sarana sertifikasi PBJP dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian atas konsistensi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang sudah disusun.
2. Melakukan monitoring terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Melakukan koordinasi dengan BHOSDM guna mendapatkan alternatif solusi terkait personil yang diperbantukan untuk tim Sertifikasi PBJP atau mengatur jobdesk kembali disesuaikan dengan tenaga SDM yang ada.
4. Melakukan penyamaan persepsi antar pihak pengembang dan membuat sistematika koordinasi guna komunikasi yang lebih baik.
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait serta melibatkan pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan sarana sertifikasi PBJP.

2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 2 indikator Sasaran Kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	01-Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Pusat	01-Jumlah K/L yang siap menyelenggarakan clearing house	40 K/L	32 K/L
2.	02-Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Pusat	01-Jumlah K/L yang melaksanakan konsolidasi atau probity advice	25 K/L	3 K/L

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	412-Kementerian/Lembaga yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	20 K/L	5 K/L
2.	411-Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	25 K/L	3 K/L

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.1 pada bulan Maret 2023 adalah 18,5%.

3. Komponen

Tahun 2023, D4.1 memiliki 6 Komponen dari 2 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 24,17%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D4.1 TA 2023 adalah sebesar Rp1.150.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.150.000.000	255.058.720	22.18%	894.941.280
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.150.000.000	255.058.720	22.18%	894.941.280

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D4.1 (parsial) sebesar Rp57.814.137,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp93.265.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp35.450.863 atau -38,01%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.
3. Terdapat blokir anggaran pada 2 (dua) paket pengadaan jasa konsultan di D4.1.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Terkait dengan tindak lanjut blokir anggaran, D4.1 agar selalu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
4. PIC pelaporan agar meng-*update* atau menginformasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada aplikasi SiREMON.

2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 2 indikator Rincian Output, dan 6 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	03-Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah	01-Jumlah Pemda yang siap menyelenggarakan <i>clearing house</i>	80 Pemda	65 Pemda
2.	05-Terwujudnya konsolidasi dan/atau probity advice di Pemerintah Daerah	01-Jumlah Pemda yang melaksanakan konsolidasi atau <i>probity advice</i>	50 Pemda	12 Pemda

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	422-Pemerintah Daerah yang Terbangun Kapabilitas Untuk Melaksanakan Clearing House	80 Pemda	65 Pemda
2.	421-Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK Dalam Proses PBJ	50 Pemda	12 Pemda

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.2 pada bulan Maret 2023 adalah 48,63%.

3. Komponen

Tahun 2023, D4.2 memiliki 6 Komponen dari 2 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 18,75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D4.2 TA 2023 adalah sebesar Rp1.810.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.810.000.000	109.059.1310	6,03%	1.700.940.869
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	1.810.000.000	109.059.131	6,03%	1.700.940.869

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator Sasaran Program Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri, masih terdapat Pemda yang hanya memenuhi indikator *Clearing House* ataupun *Probity/Konsolidasi* saja, sehingga saat ini sedang dalam proses membentuk Pemda yang memenuhi kedua indikator tersebut dalam rangka mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri.
2. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D4.2 (parsial) sebesar Rp103.584.711,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp93.642.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp9.942.711 atau 10,62%.
3. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Terhadap indikator Sasaran Program Persentase K/L/Pemda yang mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan secara mandiri:
 - a. Perlu dibuat *funneling* yang dapat memberikan data dan/atau informasi perihal progres pemenuhan kriteria *Probity/Konsolidasi* di masing-masing K/L/Pemda;
 - b. Membuat skala prioritas K/L/Pemda dan menyusun strategi pemenuhan kriteria *Probity/Konsolidasi*;
 - c. Bilamana diperlukan dapat bermitra dengan beberapa kementerian/lembaga seperti KPK, Kemendagri, BPKP atau kementerian/lembaga lainnya untuk mendorong pelaksanaan konsolidasi atau *probity*.
2. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.

3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 4 indikator Sasaran Kegiatan, 5 indikator Rincian Output, dan 14 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	04-Tersedianya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan kontrak	01-Jumlah K/L/Pemda yang siap menyelenggarakan layanan LPS	45 K/L/Pemda	Progres: 7%
		02-Jumlah APIP K/L/Pemda yang telah memiliki sistem pengaduan	40 APIP/K/L/Pemda	36 K/L/Pemda
		03-Jumlah provinsi yang memiliki infrastruktur layanan pemberian keterangan ahli	10 Provinsi	7 Provinsi
		04-Jumlah Perkara/Permasalahan PBJP yang terlayani	300 Perkara	113 Perkara

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	431-Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Dibentuk	2 Orang	Progres : 11%
2.	432-Personil Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJP yang Dibentuk	45 Orang	Progres : 7%
3.	431-Perkara Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	300 Perkara	113 Perkara
4.	432-Perkara Permasalahan Kontrak PBJP yang Terlayani LPS	25 Perkara	5 Perkara
5.	431-Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	9 Lembaga	3 Lembaga

Rata-rata progres Rincian Output (RO) D4.3 pada bulan Maret 2023 adalah 21,8%.

3. Komponen

Tahun 2023, D4.3 memiliki 14 Komponen dari 5 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 42,43%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran D4.3 TA 2023 adalah sebesar Rp1.820.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	1.820.000.000	180.680.419	9.93%	1.639.319.581
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	1.820.000.000	180.680.419	9,93%	1.639.319.581

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran D4.3 (parsial) sebesar Rp76.401.809,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp104.624.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp28.222.191 atau -26,97%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 100% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

3. PIC pelaporan agar meng-*update* atau menginformasikan kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh unit organisasi dalam melaksanakan kegiatan pada aplikasi SiREMON.

2.15 INSPEKTORAT

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Inspektorat memiliki 9 indikator Sasaran Kegiatan, 1 indikator Rincian Output, dan 4 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	01-Terwujudnya penguatan pengawasan organisasi	01-Indeks Persepsi Kepuasan Unit Organisasi terhadap Pengawasan Internal	Predikat: Memuaskan	Progres : 3,38 Persen
		02-Survei Penilaian Integritas	Predikat: Memuaskan	0
		03-Pendampingan Unit Organisasi LKPP dalam Pembangunan Zona Integritas	4 Unit Organisasi	0
		04-Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang telah ditindaklanjuti oleh LKPP	80 Persen	81,15 Persen
		05-Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKPN	100 Persen	55 Persen
		06-Persentase Pelaporan Wajib Lapor LHKASN	100 Persen	66 Persen
		07-Level kapabilitas Inspektorat LKPP	Level 3	Level 3
		08-Persentase Pemenuhan Unit Organisasi yang mendapatkan kegiatan Pengawasan Internal berdasarkan PKPT	90 Persen	24 Persen
		09-Persentase Penanganan Pengaduan	100 Persen	100 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	965-Layanan Audit Internal	12 Dokumen	Progres: 25 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Maret 2023 adalah 25%.

3. Komponen

Tahun 2023, Inspektorat memiliki 4 Komponen dari 1 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 25%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Inspektorat TA 2023 adalah sebesar Rp850.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	850.000.000	117.975.615	13,88%	732.024.385
53 Belanja Modal	-	-	0%	-
Total	850.000.000	117.975.615	13,88%	732.024.385

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Maret 2023 sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi anggaran Inspektorat (parsial) sebesar Rp63.316.260. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp36.270.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp 27.046.260 atau 74,57%.
2. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah 147,05% ditayangkan.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan harus tepat waktu.

2. Terhadap pengumuman RUP yang persentasenya sebesar 147,05%, agar dilakukan pengecekan untuk selanjutnya dilakukan perbaikan RUP.
3. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.

2.16 PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA

A. Capaian Kinerja Fisik

Tahun 2023, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (Pusdiklat) memiliki 2 indikator sasaran kegiatan, 7 indikator Rincian Output, dan 19 indikator Komponen dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan				
No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	04-Meningkatnya pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui pelatihan dan pembelajaran yang inovatif dan bermutu	01-Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi	65 Persen	25,23 Persen
		02-Persentase peningkatan kualitas pelatihan	71 Persen	34 Persen

2. Rincian Output			
No	Rincian Output	Target 2023	Realisasi/Progres
1.	511-LPPBJ yang Terakreditasi	80 Lembaga	20 Lembaga
2.	511-Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	6 NSPK	Progres: 16 Persen
3.	512-Pedoman Pelatihan PBJ	3 Pedoman	Progres: 15 Persen
4.	511-Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	5 Paket	Progres: 15 Persen
5.	511-Peserta Pelatihan PBJ Teknis	1.491 Orang	2.330 Orang
6.	512-Peserta Pelatihan PBJ Fungsional	805 Orang	574 Orang
7.	512-Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan PBJP	2 Laporan	Progres: 30 Persen

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusdiklat pada bulan Maret 2023 adalah 30,14%.

3. Komponen

Tahun 2023, Pusdiklat memiliki 19 Komponen dari 7 Rincian Output dengan rata-rata progres komponen adalah 24,75%.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Pagu anggaran Pusdiklat TA 2023 adalah sebesar Rp4.100.000.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Maret 2023 (kumulatif), Penyerapan per jenis belanja pada Pusdiklat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	0%	-
52 Belanja Barang	3.518.180.000	367.363.563	10,44%	3.150.816.437
53 Belanja Modal	581.820.000	-	0%	581.820.000
Total	4.100.000.000	367.363.563	8,96%	3.732.636.437

C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Maret 2023, realisasi penyerapan anggaran Pusdiklat (parsial) adalah sebesar Rp217.200.736, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp300.393.250 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp83.192.514 atau -27,69%.
2. Terdapat beberapa catatan/permasalahan yang sama dengan bulan sebelumnya, yaitu:
 - a. Sampai dengan bulan Maret 2023 realisasi dan capaian pada Rincian Output Peserta Pelatihan PBJ Teknis sudah melebihi target tahun 2023.
 - b. Pada Rincian Output Peserta Pelatihan PBJ Fungsional sudah mencapai lebih dari 70% dari target, sehingga diperkirakan dalam waktu dekat realisasi akan melebihi target tahun 2023.
 - c. Terdapat permasalahan pada indikator Sasaran Kegiatan Persentase peserta pelatihan yang memenuhi standar kelulusan pelatihan dan sertifikasi kompetensi uji yaitu kompetensi belum dilaksanakan sehingga belum dapat ditentukan kelulusan dari peserta penjenjangan dan okupasi.
3. Terkait Rincian Output LPPBJ yang Terakreditasi, kegiatan layanan akreditasi belum dapat dilaksanakan dikarenakan dokumen LPPBJ belum siap sehingga kegiatan layanan dilakukan *reschedule*.

D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar realisasi anggaran sesuai dengan Rencana Penarikan Dana maka pimpinan unit organisasi diharapkan:
 - a. Melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun serta mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Menyelesaikan administrasi dokumen pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu.
2. Terhadap paket pengadaan yang telah ditayangkan di SiRUP perlu dilakukan monitoring proses pengadaan barang/jasanya dan selalu berkoordinasi dengan PPK/Pokja/PP.
3. Terkait dengan Rincian Output Peserta Pelatihan PBJ Teknis dan Peserta Pelatihan PBJ Fungsional, agar berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja tahun 2023.
4. Terkait dengan uji kompetensi yang belum dapat dilaksanakan, PUSDIKLAT agar selalu berkoordinasi dengan Direktorat Sertifikasi Profesi.
5. Meningkatkan koordinasi dengan pihak LPPBJ agar dokumennya lengkap sehingga kegiatan akreditasi dapat dilaksanakan.
6. Memperbarui atau meng-*update* progres status pengadaan pada menu pengadaan di aplikasi SIREMON.

BAB III KESIMPULAN

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Maret 2023, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada tahun 2023, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp200.222.132.000 dan sampai dengan bulan Maret 2023 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp27.603.109.569 (13,79%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	55.409.162.000	10.181.190.851	18,37%	45.227.971.149
52 Belanja Barang	118.644.545.000	16.130.444.218	13,60%	Rp102.514.100.782
53 Belanja Modal	26.168.425.000	1.291.474.500	4,94%	24.876.950.500
Total	200.222.132.000	27.603.109.569	13,79%	172.619.022.431

2. Realisasi anggaran LKPP pada bulan Maret 2023 (parsial) sebesar Rp13.833.048.884, realisasi penyerapan anggaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) LKPP pada bulan Maret 2023 sebesar Rp13.852.932.793 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp19.883.909 atau -0,14%.
3. Unit organisasi yang memiliki deviasi RPD masih dalam ambang batas ($\pm 5\%$) adalah Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional (D1.3), sedangkan unit organisasi lainnya memiliki deviasi RPD di luar ambang batas ($\pm 5\%$).
4. Pada bulan Maret 2023, LKPP telah membuat kontrak/komitmen sebanyak 31 paket dengan total nilai kontrak yaitu sebesar Rp35.813.173.126 dan yang sudah dibayarkan sebesar Rp8.876.262.075.
5. Pada tahun 2023, pagu pengadaan LKPP sebesar Rp144.812.970.000 (72,33%). Berdasarkan data rekapitulasi paket pengadaan yang telah diumumkan pada aplikasi SiRUP per tanggal 03 April 2023, LKPP telah mengumumkan paket pengadaan sebesar Rp111.124.906.200 atau sebesar 76,74%. Masih terdapat Rp33.688.063.800 (23,26%) yang belum diumumkan melalui aplikasi SiRUP.
6. Nilai IKPA LKPP bulan Maret 2023 berdasarkan Aplikasi OM-SPAN (spanint.kemenkeu.go.id) adalah sebesar 96.06.
7. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LKPP pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan sampai dengan 04 April 2023 adalah sebesar 31,98, nilai tersebut termasuk kedalam kategori Sangat Kurang.
8. Setiap pimpinan unit organisasi agar:

- a. melakukan akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap memperhatikan target penyerapan anggaran per jenis belanja berdasarkan RPD yang telah disusun unit organisasi masing-masing karena akan mempengaruhi nilai IKPA di tingkat lembaga;
- b. mencermati dan segera meng-update pengumuman RUP di SiRUP untuk unit organisasi yang penayangan RUP pada aplikasi SiRUP belum sesuai dengan anggaran belanja pengadaan;
- c. memonitor dan memastikan capaian setiap indikator kinerja unit organisasi masing-masing;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SiREMON sebagai media pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap progres serta pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran pada unit organisasinya masing-masing; dan
- e. menindaklanjuti rekomendasi unit organisasi masing-masing yang terdapat pada Bab II Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Maret 2023.

